



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renstra yang telah ditetapkan ditinjau kembali dengan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam



Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 pada Tahun 2025, untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah), penyesuaian untuk mengintegrasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perencanaan pembangunan. Dan perubahan aturan tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Rencana Kerja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan di bidang Ketentraman Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegak Peraturan Daerah dan Bidang Pemadam Kebakaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Penyusunan Renja Perubahan juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah ditingkat Provinsi dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian



kegiatan penyusunan APBD lima tahunan Perangkat Daerah, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.

Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu: Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun; Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah terdiri dari: Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah merupakan rencana untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah merupakan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah.

Proses penyusunan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- b. Penyusunan Renstra-PD dimaksud berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD, dan program kewilayahan.
- c. Pemda menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)



yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja PD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Renja Pemerintah.

- d. Renja PD merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- e. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas, pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemda maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- f. Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- h. Penyusunan RKPD diselesaikan per triwulan.
- i. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Untuk itu perumusan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan ditingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah kabupaten dan program perangkat daerah ditingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dilakukan dalam tahapan penyusunan Renja untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten terhadap sasaran perangkat daerah terkait di tingkat Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri ditingkat pusat.



Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah mempunyai Visi yaitu :

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh, dan Berkelanjutan.”

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk “Pesisir Selatan Maju, Tumbuh, dan Berkelanjutan.” dilaksanakan melalui enam misi yaitu :

1. Pesisir Selatan yang Profesional dan Berintegritas
2. Pesisir Selatan yang Cerdas dan Berakhlak
3. Pesisir Selatan yang Sehat dan Sejahtera
4. Pesisir Selatan sebagai Destinasi Wisata Unggul dan Berdaya Saing
5. Pesisir Selatan sebagai Sentra Pangan
6. Pesisir Selatan yang Lestari dan Tanggap Bencana

Berdasarkan 6 (Enam) misi yang ada dapat dilihat bahwa misi 6 berkaitan dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yakni :

Misi ke -6 : Pesisir Selatan yang Lestari dan Tanggap Bencana

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mewujudkan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Misi adalah sesuatu yang harus diemban



atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Melalui penjabaran misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi / organisasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dalam hal ini memiliki program tersebut berperan penting dalam mewujudkan misi Kepala Daerah.

Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Selanjutnya, Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) .

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 diantaranya adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;



1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kabupaten pesisir selatan dengan melibatkan segala stakeholders dan instansi terkait, serta optimalisasi dalam penegakan peraturan daerah dan peningkatan kapasitas linmas

b. Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025
2. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergik penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kabupaten pesisir selatan
3. Terwujudnya penegakan peraturan daerah yang berlaku dikabupaten pesisir selatan
4. Terwujudnya pencegahan bahaya pada masing-masing nagari wilayah kabupaten pesisir selatan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran , proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Dokumen RKPD, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam



Kebakaran dengan Renja K/L dan Renja Provinsi.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan yang mengatur kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II: Hasil Evaluasi Rencana Kerja OPD tahun 2024.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 dan Capaian Renstra OPD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berisikan kajian terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan



Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Berisikan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran .

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dikaitkan dengan sasaran target kerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran .

3.3 Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap bahan rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai



rekapitulasi program dan kegiatan; penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 dan Capaian Renstra OPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Pada tahun anggaran 2025 Sebelum perubahan, program kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meliputi 1 program dengan 9 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Jumlah anggaran perubahan keseluruhan sebesar **Rp.8.183.539.900,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 5.335.109.939,-**. Untuk menilai kinerja capaian keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi "Sangat Tinggi" yaitu capaian berkisar antara 91-100%, "Tinggi" yaitu capaian berkisar antara 75-90%, "Sedang" yaitu capaian berkisar antara 65-74%, "Rendah" yaitu capaian berkisar antara 50- 64%, dan "Sangat Rendah" yaitu capaian di bawah 50%. Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja tahun 2025 status capaian "Sedang" sebesar (67,73%). Untuk capaian kinerja keluaran (output) kegiatan sudah tercapai sesuai perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan sebelum perubahan tahun 2025 dapat dilihat dari berbagai indikator pada setiap sasaran yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Tabel Rekapulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai dengan Tahun berjalan, dengan Tabel 2.1 dibawah ini:



Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Pesisir Selatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja OPD Tahun 2025	Realisasi Renja OPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB									
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			100	12	12	12	100%	12	48	100%
1051	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100	12	12	12	100%	12	48	100%
105101	Keg. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	60	12	12	12	100%	12	48	100%



1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	60	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2			Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	2640	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2580	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2			Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130	12	12	12	100%	12	48	100%



1	0	0	2			Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	240	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	900	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	20	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	12	12	12	100%	12	48	100%



1	0	0	2	0		Sub. Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	20	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2			Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2			Keg. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100	12	12	12	100%	12	48	100%



1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	60	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	600	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya	10	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda yang ditegakkan	100	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Keg. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah Patroli yang dilaksanakan	60	12	12	12	100%	12	48	100%



1	0	0	2	0		Sub.Keg. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan petroli, pengamanan, dan Pengawalan	195	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	200	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub.Keg. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	60	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub.Keg. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat yang telah dibuat dan Dimutakhirkan	15	12	12	12	100%	12	48	100%



1	0	0	2	0		Sub.Keg. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	15	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	1		Sub.Keg. Pencegahan Gangguan Kententraman dan Ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Kententraman dan Ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	60	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	1		Sub.Keg. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		15	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2			Keg. Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/ kota dan Peraturan Bupati/ wali kota	Terlaksananya Operasi Penegakan Perda	60	12	12	12	100%	12	48	100%



1	0	0	2	1		Sub. Keg. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	60	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Penanganan Atas Pelanggaran Perda	2.340	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2			Keg. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ kota	Terbayarnya Biaya Operasional Satgas Damkar	60	12	12	12	100%	12	48	100%



1	0	0	2	0		Sub. Keg. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.500	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2			Keg. Investigasi Kejadian Kebakaran	jumlah laporan investigasi kejadian kebakaran	180	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan meliputi Penelitian dan pengujian dan Penelitian	60	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2			Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Kebakaran	5	12	12	12	100%	12	48	100%
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap Tahunnya	3.000	12	12	12	100%	12	48	100%



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayananan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang Ketentraman Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegak Peraturan Daerah dan Bidang Pemadam Kebakaran, maka cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dengan Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari capaian pelaksanaan tugasnya yaitu:

a. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

- ✓ Administrasi perkantoran;
- ✓ Pelaksanaan Penertiban terhadap pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketentraman,Keindahan);
- ✓ Peningkatan ketertiban, ketentraman, keindahan, dilingkup wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;



- ✓ Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati Serta mengamankan kebijakan Pemerintah;
- ✓ Pelaksanaan Patroli wilayah terhadap gangguan ketertiban, ketentraman, keindahan dan pelanggaran Perda dilingkup wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- ✓ Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bukan hanya peningkatan secara kuantitas tapi segi kualitas;
- ✓ Penanggulangan Bencana kebakaran yang mencakup pelayanan kebakaran Kabupaten/Kota, tingkat waktu tanggap (respon time rate), Persentase aparatur/ pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi;

b. Sumber Daya Manusia Aparatur

- ✓ Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
- ✓ Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
- ✓ Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

c. Sarana dan Prasarana

- ✓ Mengembangkan informasi teknologi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan bidang Ketentraman Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegak Peraturan Daerah dan Bidang Pemadam Kebakaran.
- ✓ Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.



- ✓ Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
- ✓ Peningkatan sarana prasarana Ketentraman Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegak Peraturan Daerah dan Bidang Pemadam Kebakaran sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan akses pelayanan yang bermutu dan berkualitas.

Pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini: T-C30.



Tabel T-C. 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					RELISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																		
5.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				85.23	87.95	91.11	92.00	93.02	26.20	26.20	26.20	67.16	67.16	26.20	26.20	26.20	67.16	67.16
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				0.75	0.79	0.85	0.89	0.91	84.34	84.34	84.34	92	94.67	84.34	84.34	84.34	92.00	94.67
5.3	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran				37.00	40.00	45.00	50.00	50.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
5.4	Persentase Pelayanan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran				0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	3.83	3.38	7.75	31.50	12.50	3.83	3.38	7.75	31.50	12.50



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

2.3.1 Analisis tingkat kinerja

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Ketentraman Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegak Peraturan Daerah dan Bidang Pemadam Kebakaran pada Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pencapaian Misi ke-6 yakni: Pesisir Selatan Yang Lestari Dan Tanggap Bencana

Dalam upaya mewujudkan misi Kepala Daerah tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dibantu pelaksana inti pelaksanaan Tugas Jabatan struktural berperan untuk melakukan Penertiban terhadap pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketentraman,Keindahan) Kabupaten Pesisir Selatan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mewujudkan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Ketentraman Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegak Peraturan Daerah dan Bidang Pemadam Kebakaran dalam pembangunan merupakan



bentuk upaya Pemerintahan Daerah dalam mengurangi gangguan ketertiban, ketentraman, keindahan dan pelanggaran perda dan juga penanggulangan kebakaran di lingkup wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dalam hal ini memiliki program tersebut berperan penting dalam mewujudkan misi Kepala Daerah.

Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Selanjutnya, Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

2.3.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan merupakan gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan yang dihadapi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Masih Kurangnya kuantitas personil Satpolpp dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan bila dibandingkan dengan rasio luas wilayah serta jumlah penduduk saat ini.
2. Belum optimalnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan di bidang Ketentraman Umum,



Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegak Peraturan Daerah dan Bidang Pemadam Kebakaran.

3. Belum optimalnya Koordinasi dalam penyelenggaraan Ketentraman Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegak Peraturan Daerah dan Bidang Pemadam Kebakaran.
4. Ketersediaan saran dan prasarana penunjang operasional tugas, pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar.
5. Belum di pahamiya serta utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektifitas program / kegiatan.
6. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

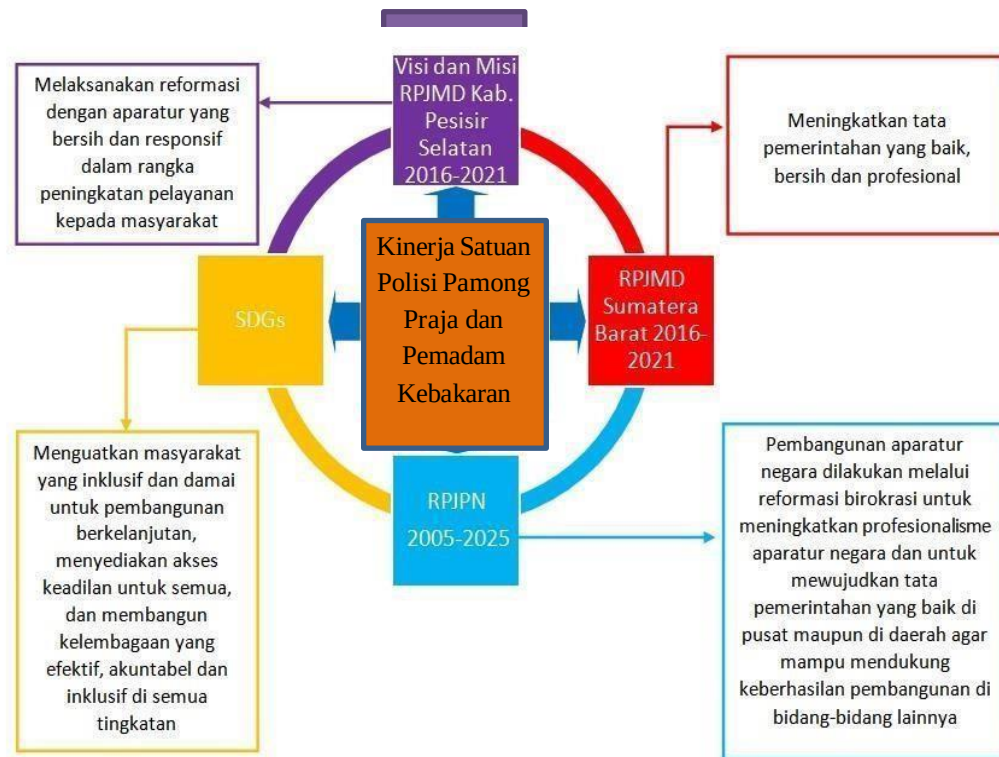
2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan berperan langsung dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Perubahan Paradigma penyelenggaraan Ketentraman Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Penegak Peraturan Daerah dan Pemadam Kebakaran yang sebelumnya responsive (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman Masyarakat, Perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.



Hubungan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RPJPN dan SDGs dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut ini :

Gambar 2.1
Hubungan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan RPJMD Kabupaten,
RPJMD Provisi Sumatera Barat, RPJPN dan SDGS





2.3.4 Tantangan dan Peluang

Dalam pengembangan pelayanan Dalam upaya mewujudkan misi Kepala Daerah tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pelaksana inti Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satpol PP yang dapat kami kembangkan kami coba analisa dengan menggunakan analisa SWOT:

Kekuatan (Strengths)

1. Dukungan anggaran
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. Dasar hukum.
4. Ketersediaan kuantitas SDM Aparatur Satpol PP dan Damkar.
5. Adanya kerjasama antar instansi terkait

Kelemahan (Weaknesses)

1. Keterbatasan anggaran yang ditetapkan.
2. Keterbatasan Sarpras.
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugasdan fungsi.
4. Keterbatasan kualitas SDM Satpol PP dan Damkar.
5. Kerjasama antar instansi terkait yang belum terintegerasi dengan baik.

Peluang (Opportunities)

1. Adanya dukungan anggaran dan Sarpras dari Pemkab.



2. Adanya Diklat-Diklat yang diberikan kepada personil PNS Satpol PP dan Damkar dalam pengembangan kompetensi.
3. Manajemen Organisasi yang berorientasi hasil sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang baik.
4. Adanya potensi aparatur Satpol PP dan Damkar hasil mengikuti Diklat.
5. Keberadaan Jafung Pol PP dan Damkar
6. Keinginan masyarakat pada kondisi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertib.

Tantangan (Threats)

1. Tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang diukur melalui SAKIP.
2. Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
3. Tuntutan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik.
4. Tuntutan peningkatan kompetensi aparatur Satpol PP dan Damkar baik secara sikap, pengetahuan, dan wawasan.
5. Kontrol sosial (masyarakat) semakin meningkat yang dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi.

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Strategis

Dalam upaya melakukan misi untuk Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tertib yang Nyaman dan Berkesan dan Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing,



maka perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta menyusun program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan, maka perumusan isu-isu strategis adalah:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Aparatur tidak memadai.
2. Kurangnya Aparatur belum mengerti apa yang menjadi tugas dan fungsinya.
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kendaraan operasional (penertiban, pengawalan, perlindungan masyarakat) tidak memadai.
4. Pos Jaga Titik belum optimal terbangun.
5. Perlengkapan/Peralatan Penertiban tidak lengkap.
6. Penggunaan tata kelola Aplikasi Sistem tidak dikerjakan dengan baik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2024, maka Rencana Kerja Tahun 2025 relatif tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perbandingan antara Rancangan RKPD dengan Rencana Kerja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian amat penting untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Renstra Satuan



Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2025. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:



Tabel 2.4
Tabel (T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2025
KABUPATEN PESISIR SELATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No / Kode	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.159.412.486	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.159.412.486	
2 19 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Bulan)	12 Bulan	17.519.108		Pesisir Selatan	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Bulan)	12 Bulan	17.519.108	
2 19 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bulan)	12 Bulan	4.910.880.172		Pesisir Selatan	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bulan)	12 Bulan	4.910.880.172	
2 19 01 2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Bulan)	12 Bulan	-	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Bulan)	12 Bulan	-	
2 19 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)	12 Bulan	196.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)	12 Bulan	196.000.000	
2 19 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	12 Bulan	181.455.486		Pesisir Selatan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	12 Bulan	181.455.486	
2 19 01 2.07	Keg. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya . Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	12 Bulan	-	Keg. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya . Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	12 Bulan	-	
2 19 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	12 Bulan	1.508.433.720	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	12 Bulan	1.508.433.720	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 akan melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung bisa menjadi program dan kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran , melalui usulan yang ditampung dari Musrenbang tingkat Kecamatan. usulan-usulan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Tabel (T-C.3.2)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
KABUPATEN PESISIR SELATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Rancangan Awal RKPD					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Besaran Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	se Kabupaten Pesisir Selatan	cakupan pelayanan dan evakuasi kebakaran	203.307.968	100%	
	JUMLAH			203.307.968		



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai berbagai kelompok masyarakat, institusi atau individu. Secara umum terdapat beberapa permasalahan:

1. Masih Kurangnya kuantitas personil Satpol pp dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan bila dibandingkan dengan rasio luas wilayah serta jumlah penduduk saat ini.
2. Belum optimalnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan di bidang Ketentraman Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegak Peraturan Daerah dan Bidang Pemadam Kebakaran.
3. Belum optimalnya Koordinasi dalam penyelenggaraan Ketentraman Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegak Peraturan Daerah dan Bidang Pemadam Kebakaran.
4. Ketersediaan saran dan prasarana penunjang operasional tugas,pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar.
5. Belum di pahamiya serta utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektifitas program / kegiatan.
6. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan



Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Adapun Tujuan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Tersedianya sarana, prasarana dan personil Satpol PP dan Damkar yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah
2. Terwujudnya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
3. Terpenuhinya kemampuan personil dalam penanganan kebakaran dan proteksi kebakaran
4. Meminimalisir potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran.
5. Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan operasi wilayah serta patrol rutin sesuai dengan standar berlaku
6. Tersedianya Satlinmas sebagai motor organisasi social yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Terwujudnya sarana dan prasarana representative dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
2. Kuantitas dan kualitas ideal personil Pol PP
3. Kuantitas dan kualitas ideal personil Pemadam Kebakaran
4. Mewujudkan mitigasi kebakaran yang handal, dini dan komprehensif



5. Operasi penegakan perda dan perkara patrol rutin kondisifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah pessel
6. Masyarakat nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran

Hubungan Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel 3.2 :



Tabel 3.2

**Tujuan, Sasaran Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026**

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					RELISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																		
5.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				85.23	87.95	91.11	92.00	93.02	26.20	26.20	26.20	67.16	67.16	26.20	26.20	26.20	67.16	67.16
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				0.75	0.79	0.85	0.89	0.91	84.34	84.34	84.34	92	94.67	84.34	84.34	84.34	92.00	94.67
5.3	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran				37.00	40.00	45.00	50.00	50.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
5.4	Persentase Pelayanan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran				0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	3.83	3.38	7.75	31.50	12.50	3.83	3.38	7.75	31.50	12.50



3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dalam Misi ke-6 yakni: Pesisir Selatan yang Lestari dan Tanggap Bencana
2. Mendukung percepatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) kinerja pada tujuan 16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
3. Melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Perumusan isu strategis dan permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Dalam Renja ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan 3 program, 6 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan jumlah total dana Pagu indikatif s e t e l a h p e r u b a h a n sebesar **Rp.8.183.539.900,-** dari Dana Alokasi Umum (DAU). Lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan kecuali untuk kegiatan rapat koordinasi serta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di luar daerah.

Program kerja dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan



Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, untuk



menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan disusunlah Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman serta arahan aktivitas tahunan sebagai penjabaran kegiatan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari rencana strategik dalam mencapai tujuan yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Program dan Kegiatan tersebut yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 2) Penyediaan bahan logistik kantor
 - 3) Penyediaan bahan cetak dan pengadaan
 - 4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 5) Fasilitas kunjungan tamu
 - 6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- d. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- e. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan



- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas , operasional atau lapangan
- 3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- 4) Pemeliharaan asset tetap lainnya

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupatten kota
 - 1) Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia
 - 2) Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik penceahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
 - 3) Menyusun SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - 4) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan dan pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
- b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Wali Kota
 - 1) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten atau kota
 - 1) Pemadaman dan pengendalian kebakaran kabupaten/kota
 - 2) Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran



- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat

Masing-masing Rencana Program dan Kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran . Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran . Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran .

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program - program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan namun



juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2025
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang U rusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2025					catatan penting	Anggaran setelah perubahan Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
					Program	Keluaran Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	9	9		10	11					
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB														
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR														
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																
1	051				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah				7.159.412.486	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.628.666.776	
1	051	02.01			Keg. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	17.519.108	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	22.619.108



1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	17.519.108	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	22.619.108
1	0	0	2			Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen hasil Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	4.910.880.172	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.095.737.901
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	4.761.980.171	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.946.837.900
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	148.900.001	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	148.900.001



1	0	0	2			Keg. Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	148.900.001	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	148.900.001
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah dokumen hasil Sub. Keg. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	14.902.583	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	24.074.928
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah dokumen hasil Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen		dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	jumlah dokumen hasil Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	39.902.288	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	51.589.593



1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jumlah dokumen hasil Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	23.330.615	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	23.330.615
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	jumlah dokumen hasil Sub. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen		dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.800.000
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	jumlah dokumen hasil Sub. Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	30.820.000	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	38.631.000
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah dokumen hasil Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	72.500.000	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	102.935.000



1	0	0	2			Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah dokumen hasil Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	1.508.443.720	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.749.844.631
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	jumlah dokumen hasil Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	75.643.720	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	97.444.631
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	jumlah dokumen hasil Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	1.432.800.000	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.652.400.000
1	0	0	2			Keg. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	jumlah dokumen hasil Keg. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	345.144.000	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	322.104.000



1	0	0	2	0	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	jumlah dokumen hasil Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	39.190.000	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	39.190.000
1	0	0	2	0	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	jumlah dokumen hasil Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	271.750.000	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	237.640.000
1	0	0	2	0	Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	jumlah dokumen hasil Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	9.250.000	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20.350.000



1	0	0	2	0		Sub. Keg. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya	jumlah dokumen hasil Sub. Keg. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	7.850.000	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.850.000
1	0	0	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda yang ditegakkan	JUMLAH DOKUMEN HASIL PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	290.976.717	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	300.980.652
1	0	0	2	0	1	Keg. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah Patroli yang dilaksanakan	jumlah dokumen hasil Keg. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen		dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	



1	0	0	2	0		Sub.Keg. Pencegahan Gangguan Kententraman dan Ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan petroli, pengamanan, dan pengawalan	jumlah dokumen hasil Sub.Keg. Pencegahan Gangguan Kententraman dan Ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	101.595.422	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	122.640.922
1	0	0	2	0		Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	jumlah dokumen hasil Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak asasi Manusia	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	19.360.000	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	19.844.000



1	0	0	2	0		Sub.Keg. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Tekhnik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Tekhnik Pencegahan Kejahatan	jumlah dokumen hasil Sub.Keg. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Tekhnik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamata n	100%	12 Dokume n	15.333.200	dana transfer umum- dana alokasi		persentase ketercapaia n program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	27.833.900
1	0	0	2	0		Sub.Keg. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	jumlah dokumen hasil Sub.Keg. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamata n	100%	12 Dokume n	1.000.200	dana transfer umum- dana alokasi		persentase ketercapaia n program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	
1	0	0	2	0		Sub.Keg. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	jumlah dokumen hasil Sub.Keg. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamata n	100%	12 Dokume n		dana transfer umum- dana alokasi		persentase ketercapaia n program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	



1	0	0	2	1	5	Sub.Keg. Pencegahan Gangguan Kententrman dan Ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Kententrman dan Ketertiban umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	jumlah dokumen hasil Sub.Keg. Pencegahan Gangguan Kententrman dan Ketertiban umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen		dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	
1	0	0	2	1	7	Sub.Keg. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		jumlah dokumen hasil Sub.Keg. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	2.000.000	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	
1	0	0	2	0	2	Keg. Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/ kota dan Peraturan Bupati/ wali kota	Terlaksananya Operasi Penegakan Perda	jumlah dokumen hasil Keg. Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/ kota dan Peraturan Bupati/ wali kota	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	90.649.517	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	92.250.451



1	0	0	2	1		Sub. Keg. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	jumlah dokumen hasil Sub. Keg. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen		dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Penanganan Atas Pelanggaran Perda	jumlah dokumen hasil Sub. Keg. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen		dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	
1	0	0				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	228.892.968	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	253.892.472



1	0	0	2			Keg. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ kota	Terbayarnya Biaya Operasional Satgas Damkar	Keg. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ kota	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	203.307.968	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	155.527.418
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil Sub. Keg. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen		dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	
1	0	0	2			Keg. Investigasi Kejadian Kebakaran	jumlah laporan investigasi kejadian kebakaran	jumlah dokumen hasil Keg. Investigasi Kejadian Kebakaran	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	4.175.000	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.505.600



1	0	0	2	0		Sub. Keg. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan meliputi Penelitian dan pengujian dan penelitian	jumlah dokumen hasil Sub. Keg. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	4.175.000	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.505.600
1	0	0	2			Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	jumlah dokumen hasil Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	21.410.000	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20.079.004
1	0	0	2	0		Sub. Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya	jumlah dokumen hasil Sub. Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Pesisir Selatan semua Kecamatan	100%	12 Dokumen	21.410.000	dana transfer umum-dana alokasi		persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20.079.004

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. PESISIR SELATAN TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN								9.821.694.337,00	7.911.980.171,00	7.679.282.171,00	-2.142.412.166,00						9.821.694.337,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.821.694.337,00	7.911.980.171,00	7.679.282.171,00	-2.142.412.166,00							9.821.694.337,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							9.821.694.337,00	7.911.980.171,00	7.679.282.171,00	-2.142.412.166,00							9.821.694.337,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.798.951.803,00	7.235.134.936,00	7.159.412.486,00	0,00							8.798.951.803,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	45.245.845,00	20.771.608,00	17.519.108,00	-27.726.737,00			-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	-		45.245.845,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	45.245.845,00	20.771.608,00	17.519.108,00	-27.726.737,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			45.245.845,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.702.453.300,00	4.910.880.172,00	4.910.880.172,00	208.426.872,00			-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	-		4.702.453.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	4.500.000.000,00	4.761.980.171,00	4.761.980.171,00	261.980.171,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			4.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	202.453.300,00	148.900.001,00	148.900.001,00	-53.553.299,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			202.453.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	196.000.000,00	196.000.000,00	-4.000.000,00			-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	-		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				214 Paket	214 Paket	200.000.000,00	196.000.000,00	196.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	312.812.658,00	253.925.436,00	181.455.486,00	-131.357.172,00			-	- -	-		312.812.658,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	14.902.583,00	14.902.583,00	-97.417,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	39.902.288,00	39.902.288,00	-97.712,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.617.816,00	23.330.565,00	23.330.615,00	1.712.799,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			21.617.816,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			5.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.820.000,00	30.820.000,00	820.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.794.842,00	144.970.000,00	72.500.000,00	-128.294.842,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			200.794.842,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.085.000.000,00	1.508.443.720,00	1.508.443.720,00	-1.576.556.280,00			-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	-		3.085.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	75.643.720,00	75.643.720,00	-9.356.280,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000.000,00	1.432.800.000,00	1.432.800.000,00	-1.567.200.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			3.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	453.440.000,00	345.114.000,00	345.114.000,00	-108.326.000,00			-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	-		453.440.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			39.190.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	380.000.000,00	271.750.000,00	271.750.000,00	-108.250.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			380.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			9.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	25.000.000,00	24.924.000,00	24.924.000,00	-76.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	498.683.800,00	397.276.217,00	290.976.717,00	0,00							498.683.800,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	228.683.800,00	220.478.322,00	139.288.822,00	-89.394.978,00			-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	-		228.683.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	21.120.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00	-1.760.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			21.120.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				40 Dokumen	40 Dokumen	100.000.000,00	29.160.700,00	15.333.200,00	-84.666.800,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				40 Dokumen	40 Dokumen	5.000.000,00	1.000.200,00	1.000.200,00	-3.999.800,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				40 laporan	40 laporan	100.000.000,00	168.957.422,00	101.595.422,00	1.595.422,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				40 Laporan	40 Laporan	2.563.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-563.800,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			2.563.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	220.000.000,00	110.699.517,00	90.649.517,00	-129.350.483,00			-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	-		220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan				40 laporan	40 laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	92.744.517,00	77.744.517,00	27.744.517,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				40 Laporan	40 Laporan	100.000.000,00	17.955.000,00	12.905.000,00	-87.095.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	66.098.378,00	61.038.378,00	11.038.378,00			-	Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi. Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah																			
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	66.098.378,00	61.038.378,00	11.038.378,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi. Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-				-	-	524.058.734,00	279.569.018,00	228.892.968,00	0,00							524.058.734,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	414.250.454,00	251.754.018,00	203.307.968,00	-210.942.486,00			-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	-		414.250.454,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				90 Laporan	90 Laporan	310.000.004,00	179.403.568,00	137.882.518,00	-172.117.486,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			310.000.004,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				14 Unit	14 Unit	54.250.450,00	54.250.450,00	54.250.450,00	0,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			54.250.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	18.100.000,00	11.175.000,00	-38.825.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-				-	-	30.000.000,00	5.255.000,00	4.175.000,00	-25.825.000,00			-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	-		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	5.255.000,00	4.175.000,00	-25.825.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	79.808.280,00	22.560.000,00	21.410.000,00	-58.398.280,00			-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	-		79.808.280,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				546 Orang	546 Orang	79.808.280,00	22.560.000,00	21.410.000,00	-58.398.280,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.			79.808.280,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	J U M L A H								9.821.694.337,00	7.911.980.171,00	7.679.282.171,00	-2.142.412.166,00						9.821.694.337,00		



BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Besar harapan kami agar dokumen Renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja di masa yang akan datang.

Kepala Dinas,



ZULKIFLI, S.Sos
NIP. 19690218 199303 1 003